



Ali bin Abi Thalib: Kekhalifahan di Tengah Tiga Pemberontakan Besar

Nur Hasanah Hasibuan

22390124907@students.uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Afrizal

afrizal.m@uin.suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Sawaluddin

regarsawaluddin@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Korespondensi penulis : 22390124907@students.uin-suska.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the three major rebellions faced by Ali ibn Abi Talib during his leadership: the Rebellion of Talhah and his allies, the Challenge of the Khawarij, and the Rebellion of Mu'awiyah. These events had a profound impact on early Islamic politics and theology. This research utilizes a qualitative method with a descriptive-analytical approach, focusing on a literature review of primary and secondary sources. Data were gathered through in-depth analysis of various academic journals discussing the dynamics of Ali's leadership. The findings reveal that these three rebellions not only weakened Ali's political power but also exacerbated divisions within the Muslim community, especially concerning theological and leadership issues. These conflicts triggered the emergence of various Islamic sects, such as the Khawarij and Shia, which continue to influence Islamic political development in subsequent periods. The conclusion of this study is that Ali ibn Abi Talib's leadership period marked a significant transitional era in Islamic history, during which major shifts in politics and theology had long-lasting effects on the Muslim community.*

Keyword: *Ali ibn Abi Talib, Caliphate, Rebellion of Talhah, Challenge of the Khawarij, Rebellion of Muawiyah*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga pemberontakan utama yang dihadapi Ali bin Abi Thalib selama masa kepemimpinannya yaitu Pemberontakan Thalhah CS, Tantangan Khawaris, dan Pemberontakan Mu'awiyah. Ketiga peristiwa tersebut memberikan pengaruh besar terhadap politik dan teologi Islam awal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang berfokus pada kajian literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui analisis mendalam terhadap berbagai jurnal akademik yang membahas dinamika kepemimpinan Ali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pemberontakan ini tidak hanya melemahkan kekuatan politik Ali, tetapi juga memperburuk perpecahan di kalangan umat Islam, khususnya dalam hal isu teologis dan kepemimpinan. Konflik-konflik ini memicu munculnya berbagai sekte dalam Islam, seperti Khawarij dan Syiah, yang terus mempengaruhi perkembangan politik Islam di masa mendatang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa periode kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan masa transisi penting dalam sejarah Islam, di mana terjadi perubahan besar dalam politik dan teologi yang memiliki dampak jangka panjang bagi umat Islam.

Kata kunci: Ali bin Abi Thalib, Kekhalifahan, Pemberontakan Thalhah, Tantangan Khawarij, Pemberontakan Muawiyah.

Pendahuluan

Sebagai bagian dari perjalanan peradaban manusia, konflik dan dinamika politik sering mencerminkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai moral dan keadilan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut berperan dalam membawa perubahan signifikan, baik dalam aspek sosial maupun politik.

Di satu sisi, kemajuan ini menawarkan berbagai manfaat, tetapi di sisi lain, memunculkan tantangan yang dapat mengancam stabilitas nilai-nilai kemanusiaan (Sawaluddin et al., 2022).

Hal ini tampak jelas dalam sejarah Islam, terutama pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ketika berbagai konflik internal menjadi ujian berat bagi tatanan politik Islam.

Dalam catatan sejarah Islam, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai era penuh gejolak dan konflik internal yang signifikan. Sebagai khalifah ke empat dan terakhir dalam masa Khulafaur Rasyidin, Ali harus menghadapi berbagai pemberontakan yang menantang stabilitas kekuasaannya. Pemberontakan yang dipimpin oleh Thalhah dan Zubair, tantangan dari kelompok Khawarij, serta perlawanan besar di bawah kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjadi ujian utama bagi kemampuan kepemimpinan Ali dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap tatanan politik Islam.

Pemberontakan pertama yang dihadapi Ali berasal dari Thalhah dan Zubair, bersama Aisyah. Awalnya mereka adalah pendukung Ali, tetapi kemudian menuntut penyelidikan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Ketidakpuasan terhadap lambatnya penanganan kasus ini menyebabkan mereka berselisih dengan Ali, yang memuncak dalam Perang Jamal pada tahun 656 M. Tidak hanya menandai perpecahan dalam komunitas Muslim tetapi juga memperlemah posisi kekhalifahan. Selain itu, muncul juga kelompok Khawarij yang menolak hasil tahkim (arbitrase) yang dilakukan setelah Perang Shiffin. Khawarij, sebagai kelompok ekstremis, memandang keputusan Ali sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam, yang kemudian menambah lapisan baru tantangan bagi kekuasaannya (Hamzah & Hamriana, 2022).

Di antara semua tantangan tersebut, pemberontakan terbesar datang dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur di wilayah Syam yang menentang otoritas Ali sebab tidak tuntasnya penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Pemberontakan Mu'awiyah mencapai puncaknya pada Perang Shiffin dan tahkim, yang kemudian membuka jalan bagi Mu'awiyah untuk memperkuat posisinya dan mendirikan Dinasti Umayyiah, sebuah dinasti yang bertahan lama di dunia Islam (Setiyowati et al., 2021).

Ketiga peristiwa tersebut memberikan pengaruh besar dalam sejarah politik Islam dan menjadi subjek kajian penting bagi banyak sejarawan. Konflik-konflik ini memperlihatkan perdebatan tentang legitimasi kekuasaan dan hukum Islam serta arah perkembangan politik setelah masa Khulafaur Rasyidin. Meskipun banyak penelitian yang telah membahas peristiwa-peristiwa ini, masih ada beberapa aspek yang membutuhkan eksplorasi lebih mendalam, terutama mengenai strategi politik yang diterapkan oleh masing-masing pihak dalam konflik tersebut (Rizkia & Hardiyansyah, 2022).

Melalui artikel ini, penulis berupaya untuk mengungkap lebih lanjut tiga pemberontakan yang terjadi selama masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib: pemberontakan Thalhah dan Zubair, tantangan Khawarij, dan pemberontakan Mu'awiyah. Artikel ini juga bertujuan untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut dan dampak jangka panjangnya terhadap politik Islam saat ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan, yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan yang relevan dengan topik penelitian (Evanorisa et al., 2022). Studi literatur ini difokuskan pada literatur yang membahas konflik politik selama masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, khususnya terkait pemberontakan Thalhah cs, tantangan dari kelompok Khawarij, serta pemberontakan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Literatur yang digunakan mencakup buku-buku sejarah klasik, jurnal ilmiah, dan karya-karya modern yang menganalisis dinamika politik di era tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab konflik, perkembangan peristiwa, dan dampak jangka panjangnya terhadap perkembangan politik Islam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memudahkan dalam memahami konteks historis, tetapi juga membantu menyoroti relevansi peristiwa-peristiwa tersebut dalam perspektif politik Islam kontemporer.

Hasil Penelitian

Diangkatnya Ali Bin Abi Thalib Menjadi Khalifah

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yang dikenal tidak hanya sebagai sepupu dan cucu Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan berintegritas. Pada masa kepemimpinan Ali, umat Islam menghadapi tantangan besar, baik dari dalam maupun luar, yang mencerminkan situasi politik dan sosial yang penuh ketegangan.

Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, pemilihan khalifah yang baru menjadi peristiwa yang penuh dengan ketegangan politik dan sosial. Tidak seperti pemilihan Abu Bakar dan Utsman, yang pada akhirnya disetujui oleh seluruh umat Islam, pemilihan Ali bin Abi Thalib berlangsung di tengah-tengah situasi yang kacau akibat perpecahan sosial dan politik. Masyarakat datang ke rumah Ali untuk membaiaatnya sebagai khalifah yang mana dukungan ini terutama berasal dari masyarakat Madinah dan sekitarnya (Hamdi, 2021).

Para pendukung Ali, terutama kaum Anshar, segera mendatangi rumah Ali dan mendesaknya untuk menerima jabatan khalifah. Masyarakat Madinah saat itu sepakat bahwa Ali adalah satu-satunya figur yang dianggap memiliki kemampuan dan legitimasi moral untuk mengambil alih kepemimpinan Islam (Roselani et al., 2023). Awalnya, Ali ragu dan menolak jabatan tersebut, karena ia sadar betapa sulitnya memimpin dalam situasi yang penuh konflik dan ketegangan politik. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa ia lebih suka membantu daripada menjadi pemimpin, mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dipikul. Namun, setelah melihat desakan yang begitu kuat dari masyarakat, serta menyadari bahwa penundaan pengangkatan khalifah akan memperburuk situasi, Ali akhirnya menerima jabatan khalifah (Hamdi, 2021).

Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai sosok yang dianggap layak untuk memimpin umat Islam. Beberapa alasan mendasar mengapa Ali dipilih sebagai khalifah adalah:

1. Kedekatan dengan Rasulullah: Ali bin Abi Thalib bukan hanya sepupu Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menantu beliau. Selain itu, Ali termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan memiliki reputasi sebagai salah satu sahabat yang paling setia serta berpengetahuan luas mengenai ajaran Islam. Kredibilitas Ali sebagai seorang Muslim yang berintegritas tinggi menjadikannya kandidat utama yang dipandang mampu memimpin umat Islam di masa krisis (Rokim, 2020).
2. Keilmuan dan Kebijakan: Ali dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana dan berilmu tinggi. Pengetahuan agamanya diakui oleh banyak sahabat dan ulama pada masa itu. Ia sering kali menjadi rujukan dalam persoalan hukum Islam (fiqh) dan merupakan salah satu tokoh yang paling dihormati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini memberikan keyakinan kepada umat bahwa Ali mampu mengatasi berbagai tantangan besar yang dihadapi umat Islam pasca pembunuhan Utsman (Rahmawati et al., 2024).

3. Keadilan dan Keterbukaan: Ali memiliki reputasi sebagai seorang pemimpin yang adil, yang tidak mudah dipengaruhi oleh kekayaan atau kekuasaan. Dalam masa pemerintahan sebelumnya, ia dikenal karena sikapnya yang teguh dalam menegakkan keadilan, baik dalam hal politik maupun sosial. Ini membuat banyak orang merasa bahwa Ali adalah sosok yang tepat untuk menyatukan umat Islam kembali dalam kerangka keadilan dan kebijaksanaan, di tengah-tengah perpecahan yang terjadi (Apriyani, 2023).

Pembaian Ali sebagai khalifah terjadi pada hari Jumat, 13 Dzul Hijjah 35 H atau 23 Juni 656 M di Masjid Nabawi. Meskipun Ali bukan sosok yang ambisius untuk menjadi khalifah, dukungan yang terus datang dari berbagai pihak membuatnya akhirnya menerima tanggung jawab tersebut. Langkah-langkah awal Ali sebagai khalifah antara lain mengganti beberapa pejabat yang diangkat oleh Utsman, mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada kerabatnya, dan memberikan tunjangan dari Baitul Mal kepada kaum muslimin secara merata, tanpa memandang kapan mereka memeluk Islam. Selain itu, Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah (Sulisto, 2023).

Selama masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana (Lestari et al., 2024). Ali memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, visioner, dan sangat cerdas dalam membuat keputusan. Ia juga dikenal sangat dekat dengan Allah, sering menangis karena takut kepada-Nya, dan selalu mengedepankan keadilan serta kebijaksanaan dalam setiap tindakannya (Muchlisin, 2022). Ali adalah sosok yang sederhana dalam hal pakaian dan makanan, serta selalu mendahulukan orang lain (Tabri & Masyudi, 2023).

Namun, masa kepemimpinan Ali tidak lepas dari tantangan. Konflik internal di kalangan umat Islam mulai muncul, terutama terkait dengan tuntutan untuk menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Thalhah, Zubair, dan Aisyah termasuk di antara mereka yang menuntut agar Ali segera menghukum pelaku pembunuhan Utsman, tetapi Ali menghadapi kesulitan dalam hal ini karena pembunuhan Utsman dilakukan oleh banyak pihak dari berbagai wilayah. Selain itu, Muawiyah bin Abu Sufyan juga menuntut pembalasan atas kematian Utsman dan menggunakan peristiwa tersebut untuk melemahkan legitimasi kekhalifahan Ali (Sunandar & Tomi, 2024).

Konflik dengan Muawiyah akhirnya memuncak dalam Perang Siffin, di mana kedua pasukan bertemu di medan perang. Meskipun Ali mencoba menghindari pertempuran dan menawarkan solusi damai, konflik tidak dapat dielakkan, dan pertempuran besar pun terjadi. Perang ini diakhiri dengan peristiwa tahkim (arbitrase) yang menyepakati dua orang perwakilan untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu Amr bin Ash dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Namun, hasil dari tahkim ini justru memperburuk situasi politik dan semakin memecah belah umat Islam. Selain itu, muncul kelompok Khawarij, yang menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dan merasa Ali telah melakukan kesalahan dengan menyetujui arbitrase tersebut. Kelompok ini kemudian memberontak melawan Ali, menambah tantangan dalam kepemimpinannya (Febrianti et al., 2023).

Pada akhirnya, masa kepemimpinan Ali berakhir tragis. Umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok utama, salah satunya adalah kelompok Khawarij yang memberontak terhadap Ali. Salah satu dari mereka, Abdurrahman bin Muljam, berhasil membunuh Ali di Kufah pada tahun 661 M, menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin (Febrianti et al., 2023).

Dalam bukunya *Pemikiran Kalam Imam Syafi'i* oleh Afrizal, menjelaskan bagaimana nilai-nilai keadilan dan kepemimpinan dalam Islam menjadi landasan penting dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks (M, 2020). Sebagai khalifah, Ali dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga stabilitas umat dan menegakkan keadilan, sebuah tantangan yang mencerminkan pentingnya keseimbangan antara politik dan nilai-nilai syariat.

Pemberontakan Thalhah, Zubair dan Aisyah

Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan besar sejak awal masa pemerintahannya, salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Aisyah, Zubair, dan Thalhah. Pemberontakan ini tidak hanya dipicu oleh isu keadilan atas pembunuhan Utsman, tetapi juga mencerminkan konflik politik dan ketidakpuasan yang berkembang di kalangan para sahabat dan masyarakat.

Tepatnya, setelah kekhalifahan berpindah ke tangan Ali bin Abi Thalib, pemerintahannya diguncang oleh serangkaian pemberontakan. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bersama Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Zubair dan Thalhah, meskipun awalnya termasuk yang pertama berbaiat kepada Ali, merasa kecewa karena harapan mereka untuk diangkat sebagai gubernur di Irak dan Yaman tidak terpenuhi (Hamzah & Hamriana, 2022).

Dalam pertempuran antara pasukan mereka dan tentara pemerintahan, yang dikenal sebagai Pertempuran Unta, pasukan Aisyah mengalami kekalahan, dan Zubair serta Thalhah gugur. Atas perintah Ali, Aisyah kemudian dikawal kembali ke Madinah. Setelah itu, terjadi Pertempuran Siffin antara tentara Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mengakibatkan perpecahan umat Islam menjadi tiga kelompok: kelompok yang setia kepada Ali, pengikut Muawiyah, dan Khawarij. Konflik segitiga ini berlanjut hingga Ali terbunuh oleh Abd al-Rahman bin Muljam dari kelompok Khawarij pada tahun kelima masa kekhalifahannya (Pratama & Prayoga, 2023).

Latar Belakang Pemberontakan

Thalhah dan Zubair merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dihormati dan termasuk dalam kelompok Asyrah Mubasyarah (sepuluh orang yang dijamin masuk surga). Sementara itu, Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Nabi Muhammad SAW dan tokoh perempuan yang sangat dihormati. Ketiganya merasa Ali bin Abi Thalib tidak cukup tegas dalam menghukum para pembunuh Utsman bin Affan dan menuntut Ali segera mengadakan penyelidikan serta memberikan hukuman kepada para pelaku. Ali sendiri berada dalam posisi sulit karena kompleksitas situasi politik pada saat itu. Mereka juga khawatir bahwa keabsahan kekhalifahan Ali akan dipertanyakan jika ia tidak mampu menegakkan keadilan. Awal Pemberontakan terjadi pada saat Thalhah, Zubair, dan Aisyah memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan menuju Basrah dengan tujuan menggalang dukungan dan pasukan untuk menuntut keadilan atas kematian Utsman. Basrah dipilih karena kota ini memiliki populasi yang cukup besar, dan mereka berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat di sana. Kepindahan mereka ke Basrah tidak hanya dilandasi oleh alasan strategis, tetapi juga untuk menghindari konflik langsung di Madinah, pusat pemerintahan Islam pada saat itu. Mereka berharap dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan sebelum menghadapi Ali secara langsung (Junaidi, 2020).

Terjadinya Perang Jamal

Perang Jamal, yang terjadi pada tahun 656 M, dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Ali dan para pemberontak. Ali berusaha melakukan diplomasi dengan Thalhah, Zubair, dan Aisyah sebelum konflik pecah, mengirim utusan untuk menawarkan penyelesaian damai. Namun, situasi di lapangan menjadi tak terkendali karena provokasi dari pihak tertentu. Pertempuran ini dinamakan Perang Jamal karena Aisyah memimpin pasukannya dari atas unta (jamal). Meskipun Ali berusaha menghindari pertempuran, bentrokan tidak dapat dielakkan, dan dalam pertempuran tersebut, Thalhah dan Zubair gugur. Aisyah, yang memimpin dari belakang, ditangkap namun diperlakukan dengan baik dan diantar kembali ke Madinah. Ali menguburkan Thalhah dan Zubair dengan penghormatan, mengingat mereka adalah sahabat Rasulullah yang

dihormati. Setelah peristiwa ini, Aisyah lebih banyak menarik diri dari kehidupan politik dan fokus mengajarkan hadis dan ilmu agama kepada umat Islam.

Pemberontakan Thalhah cs memiliki dampak yang sangat besar terhadap stabilitas politik umat Islam pada masa kekhalifahan Ali. Meskipun Ali berhasil meredakan pemberontakan ini, peristiwa ini semakin mempertegas terjadinya fragmentasi politik di kalangan umat Islam. Perang Jamal memperlihatkan bahwa perpecahan di antara umat Islam bukan hanya perbedaan pandangan teologis, tetapi juga konflik kepentingan politik yang tajam (Hamzah & Hamriana, 2022).

Ali menghadapi tantangan besar setelah kemenangan di Perang Jamal. Meski berhasil menang, dukungan terhadap kekuasaannya semakin tergerus di beberapa wilayah. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi Mu'awiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, untuk menggagalkan kekuatan dan melakukan pemberontakan terhadap Ali. Pemberontakan Thalhah cs secara tidak langsung membuka pintu bagi pemberontakan yang lebih besar yang dipimpin oleh Mu'awiyah, yang akhirnya mengarah pada Perang Shiffin (Hamzah & Hamriana, 2022).

Pemberontakan yang dipimpin oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah meninggalkan dampak yang signifikan dalam sejarah politik Islam, menunjukkan bahwa konflik politik internal bisa mengakibatkan perpecahan di kalangan umat Islam. Walaupun Ali berhasil mengendalikan pemberontakan tersebut, akibatnya terus berlanjut dan semakin memperdalam perpecahan politik yang akhirnya memicu konflik-konflik lain dalam sejarah Islam.

Tantangan/Konflik dengan Khawarij

Selama masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tantangan besar lainnya muncul yang mengguncang stabilitas politik dan keagamaan umat Islam, yaitu Khawarij. Awalnya, kelompok ini adalah pendukung Ali, namun mereka berbalik menentangnya setelah peristiwa Tahkim dalam Perang Siffin, yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Munculnya Khawarij tidak hanya mencerminkan perpecahan dalam politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana konflik internal dapat melahirkan ideologi ekstrem yang terus memengaruhi perjalanan sejarah Islam.

Khawarij merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Ali selama masa kekhalifahannya. Gerakan ini muncul sebagai reaksi dari peristiwa Tahkim (arbitrase) setelah Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Pada awalnya, Khawarij adalah pendukung Ali, tetapi mereka menganggap menerima arbitrase sebagai dosa besar. Hal ini melemahkan posisi Ali secara signifikan dan memperlihatkan perpecahan ideologis yang mendalam di kalangan umat Islam (Alamsyah, 2024).

Latar Belakang Munculnya Khawarij

Kelompok Khawarij muncul setelah keputusan Tahkim yang diambil untuk menyelesaikan konflik antara Ali dan Mu'awiyah. Sebagian besar pasukan Ali menolak keputusan ini karena mereka merasa bahwa arbitrase adalah bentuk kompromi yang tidak sesuai dengan syariat. Khawarij berpendapat bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas penuh dalam urusan politik dan agama, tanpa campur tangan manusia. Slogan mereka, "La hukma illa lillah" (tidak ada hukum kecuali milik Allah), menegaskan pandangan teologis mereka yang absolut (Hamzah & Hamriana, 2022).

Khawarij menuduh Ali telah menyimpang dari ajaran Islam dengan menerima arbitrase. Mereka menolak kepemimpinannya dan menganggap bahwa siapa pun yang terlibat dalam proses arbitrase telah keluar dari Islam, termasuk Ali sendiri. Perpecahan ini bukan sekadar urusan politik, tetapi juga menyangkut masalah teologis yang mendalam (Pihar et al., 2021).

Pandangan Ideologis Khawarij

Khawarij dikenal dengan pandangan yang ekstrem. Mereka percaya bahwa hanya orang yang taat sepenuhnya kepada hukum Allah yang berhak memimpin umat Islam. Mereka juga menganggap bahwa Muslim yang melakukan dosa besar telah keluar dari Islam dan pantas diperangi. Khawarij tidak hanya menolak kepemimpinan Ali, tetapi juga meng kafirkan umat Islam yang tidak sependapat dengan pandangan mereka, termasuk mereka yang tidak memerangi Ali atau Mu'awiyah (Saniah & Sidik, 2020).

Meskipun awalnya hanya kelompok kecil, ideologi Khawarij dengan cepat menyebar, terutama di kalangan masyarakat yang kecewa dengan situasi politik dan ekonomi. Pandangan mereka yang mengutamakan kesederhanaan dan kehidupan asketis menarik perhatian masyarakat miskin yang merasa tersisihkan.

Tindakan Militer Ali terhadap Khawarij

Setelah Khawarij melakukan tindakan kekerasan, Ali terpaksa mengambil tindakan militer. Pertempuran besar terjadi di Nahrawan pada tahun 658 M, di mana sebagian besar anggota Khawarij tewas. Namun, beberapa berhasil melarikan diri dan melanjutkan penyebaran ideologi mereka. Gerakan Khawarij terus menjadi ancaman bagi pemerintahan Islam, dan meskipun ditekan, pemberontakan kecil terus muncul. Salah satu dampak besar dari gerakan ini adalah pembunuhan Ali oleh Abdurrahman bin Muljam, anggota Khawarij, pada tahun 661 M, yang menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan dimulainya Dinasti Umayyiah di bawah Muawiyah (Buana, 2024).

Khawarij juga meninggalkan warisan ideologis yang terus mempengaruhi sejarah Islam, terutama dalam hal peng kafiran dan pandangan radikal terhadap jihad. Pandangan ekstrem mereka terus mempengaruhi gerakan-gerakan radikal di kemudian hari, dan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok yang menekankan takfir (peng kafiran) terhadap Muslim lainnya.

Dari paparan tersebut, Khawarij adalah salah satu kelompok paling kontroversial dalam sejarah Islam awal. Mereka menantang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, memperkenalkan konsep teologis yang radikal seperti peng kafiran terhadap Muslim yang melakukan dosa besar, dan meskipun dikalahkan secara militer, ideologi mereka tetap memengaruhi dinamika politik dan keagamaan Islam hingga kini. Tantangan yang ditimbulkan oleh Khawarij menggambarkan betapa kompleksnya konflik yang dihadapi Ali, yang mencakup tidak hanya politik, tetapi juga teologi dan ideologi yang mendalam.

Pemberontakan Mu'awiyah

Pemberontakan yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi Ali bin Abi Thalib selama masa kepemimpinannya. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan ambisi kekuasaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan politik dan agama yang mendalam antara Ali dan Mu'awiyah. Pada waktu itu, Mu'awiyah yang menjabat sebagai Gubernur Syam menolak mengakui kekhalifahan Ali setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Sebagai sepupu Utsman, Mu'awiyah mendesak Ali untuk menegakkan keadilan dengan menghukum para pelaku pembunuhan Utsman, meskipun Ali sendiri belum mampu melakukannya akibat situasi politik yang masih belum stabil.

Pemberontakan Mu'awiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu tantangan politik terbesar yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib selama masa kekhalifahannya. Konflik ini tidak hanya terjadi karena ambisi kekuasaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan politik dan keagamaan yang mendalam antara Ali dan Mu'awiyah. Mu'awiyah, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Syam (Suriah), menolak mengakui kekhalifahan Ali setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Sebagai saudara sepupu Utsman, Mu'awiyah menuntut Ali untuk menegakkan

keadilan dengan menghukum para pembunuh Utsman, meskipun Ali sendiri belum mampu melakukannya karena situasi politik yang masih kacau (Munawira et al., 2024).

Latar Belakang Konflik antara Ali dan Mu'awiyah

Mu'awiyah bin Abi Sufyan, sebagai salah satu tokoh terkemuka dari suku Quraisy merasa bahwa Ali tidak cukup tegas dalam menangani para pemberontak yang bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan. Pembunuhan Utsman menjadi isu sentral yang digunakan oleh Mu'awiyah untuk menentang kepemimpinan Ali. Dalam pandangan Mu'awiyah, tindakan Ali yang belum segera menghukum para pembunuh Utsman dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menegakkan keadilan (Syarifah, 2021).

Ada yang menganggap, Mu'awiyah menggunakan sentimen pembunuhan Utsman sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak yang merasa bahwa kekhalifahan Ali lemah dalam menegakkan hukum. Selain itu, situasi ini dimanfaatkan oleh Mu'awiyah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Syam, wilayah yang sejak lama dikenal sebagai basis kekuatan Bani Umayyah. Dengan memanfaatkan narasi bahwa Ali tidak bisa dipercaya dalam menegakkan keadilan, Mu'awiyah berhasil memobilisasi dukungan luas di kalangan penduduk Syam (Hariyanti & Mawardi, 2023).

Perang Shiffin: Konflik Militer Antara Ali dan Mu'awiyah

Konflik antara Ali dan Mu'awiyah mencapai puncaknya dalam Perang Shiffin pada tahun 657 M. Perang ini terjadi di tepi Sungai Furat, di daerah yang sekarang dikenal sebagai perbatasan antara Suriah dan Irak. Perang Shiffin merupakan perang saudara yang sangat menentukan dalam sejarah awal Islam, karena memperlihatkan perpecahan mendalam di antara kaum Muslimin. Ali memimpin pasukan dari Kufah, sementara Mu'awiyah memimpin pasukannya dari Syam.

Perang Shiffin berlangsung selama beberapa bulan dan menewaskan ribuan orang dari kedua belah pihak. Pada akhirnya, perang ini tidak menghasilkan kemenangan yang jelas. Ketika Mu'awiyah merasa bahwa pasukannya berada di ambang kekalahan, ia menggunakan taktik yang sangat kontroversial, yaitu meminta pasukannya untuk mengangkat mushaf (Al-Qur'an) di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk melakukan arbitrase (tahkim) berdasarkan hukum Allah. Strategi ini menyebabkan kebingungan di kalangan pasukan Ali, yang akhirnya menyetujui arbitrase tersebut meskipun Ali sendiri ragu-ragu.

Setelah Perang Shiffin, arbitrase atau tahkim dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah. Tahkim ini dilakukan antara perwakilan dari pihak Ali dan Mu'awiyah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali dan Amr bin Ash dari pihak Mu'awiyah. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa kedua belah pihak akan mundur dari jabatan khalifah, namun perwakilan Mu'awiyah, Amr bin Ash, berkhianat dengan menyatakan bahwa Mu'awiyah tetap berhak menjadi khalifah (Rizqullah, 2022).

Tahkim ini menjadi titik balik yang sangat merugikan bagi Ali, karena banyak pengikutnya merasa kecewa dengan hasil arbitrase tersebut. Tahkim ini bukan hanya mengurangi legitimasi politik Ali, tetapi juga menciptakan kelompok Khawarij yang kemudian menentang Ali karena menerima arbitrase. Bagi Khawarij, keputusan menerima tahkim adalah dosa besar karena menyerahkan urusan kepemimpinan kepada manusia, bukan kepada hukum Allah.

Pemberontakan Mu'awiyah tersebut tidak hanya memperlemah posisi Ali secara politik, tetapi juga memicu terjadinya perpecahan yang lebih dalam di kalangan umat Islam. Meskipun Ali masih mendapatkan dukungan di Irak dan sebagian besar Jazirah Arab, kekuatan Mu'awiyah di Syam semakin menguat. Situasi ini menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam dunia Islam, dengan Ali memimpin di Kufah dan Mu'awiyah di Syam (Arfan, 2023).

Konflik ini berkontribusi terhadap munculnya Dinasti Umayyah, yang pada akhirnya akan mendominasi politik Islam setelah kematian Ali. Mu'awiyah, yang berhasil memanfaatkan situasi politik yang kacau, menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap dalam mengelola kekuasaan tetapi juga dalam strategi politik dan militer. Setelah Ali wafat pada tahun 661 M, Mu'awiyah secara efektif menjadi khalifah tunggal, dan ini menandai dimulainya era kekuasaan Bani Umayyah yang berlangsung hingga tahun 750 M (Syukur, 2020).

Pembunuhan Ali dan Munculnya Dinasti Umayyah

Salah satu dampak terbesar dari pemberontakan Mu'awiyah adalah pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Pembunuhan ini terjadi pada tahun 661 M saat Ali sedang melaksanakan shalat di masjid Kufah. Kematian Ali mempercepat konsolidasi kekuasaan Mu'awiyah di Syam dan wilayah-wilayah lainnya. Dengan kematian Ali, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin berakhir, dan Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Mu'awiyah dimulai (Tarigan et al., 2024).

Era kekuasaan Mu'awiyah ini membawa perubahan besar dalam sistem politik Islam. Di bawah pemerintahan Umayyah, sistem kekhalifahan berubah dari model demokratis-islami yang berdasarkan syura (musyawarah) menjadi monarki hereditas, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini mengubah dinamika politik dalam Islam secara fundamental, dan pengaruh dari perubahan ini dirasakan hingga beberapa abad kemudian (Azmy & Masyudi, 2023).

Dari paparan tersebut, Pemberontakan Mu'awiyah merupakan peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah politik Islam. Konflik ini tidak hanya memperlemah kepemimpinan Ali, tetapi juga membuka jalan bagi munculnya Dinasti Umayyah yang kemudian mendominasi dunia Islam selama hampir satu abad. Melalui strategi politik yang cerdas dan pemanfaatan isu-isu keagamaan seperti pembunuhan Utsman, Mu'awiyah berhasil mendapatkan dukungan yang luas dan mengkonsolidasikan kekuasaannya di Syam. Pada akhirnya, pemberontakan Mu'awiyah tidak hanya mengubah arah sejarah politik Islam, tetapi juga menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan dimulainya sistem monarki dalam pemerintahan Islam.

Pembahasan

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menghadapi berbagai tantangan besar, terutama terkait dengan sejumlah pemberontakan yang terjadi selama masa kekhalifahannya. Pemberontakan ini tidak hanya mencakup persoalan politik, tetapi juga menyangkut isu-isu teologis yang memperdalam perpecahan dalam komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Pemberontakan Thalhah dan Zubair, yang didukung oleh Aisyah dalam Perang Jamal, menunjukkan adanya ketegangan politik pada awal masa kekhalifahan Ali. Aisyah, Thalhah, dan Zubair menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan dan menuduh Ali lambat dalam menindak para pelaku. Konflik ini lebih diakibatkan oleh perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam setelah Utsman. Meskipun Ali berhasil mengalahkan pasukan pemberontak dalam Perang Jamal, dampak dari pertempuran ini sangat mempengaruhi legitimasi kekhalifahannya. Perpecahan di antara sahabat Nabi menjadi tanda awal fragmentasi politik di kalangan Muslim yang berlanjut ke masa depan (Muharrom, 2024).

Pemberontakan kedua yang juga penting adalah Perang Shiffin, di mana Ali berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, yang menolak mengakui Ali sebagai khalifah dan menuntut keadilan bagi pembunuhan Utsman. Konflik ini bukan hanya pertempuran militer, tetapi juga sarat dengan pertimbangan politis. Keputusan untuk mengadakan arbitrase dalam Perang Shiffin melemahkan posisi Ali di mata sebagian pendukungnya. Keputusan tersebut menyebabkan hilangnya dukungan dari kelompok Khawarij yang kemudian memisahkan diri,

sementara Muawiyah memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat klaim politiknya (Pamungkas, n.d.).

Tantangan dari Khawarij menjadi isu teologis yang memperumit situasi Ali. Kelompok Khawarij, yang awalnya mendukung Ali, kemudian menentangnya karena menganggap arbitrase sebagai bentuk dosa besar. Khawarij menolak otoritas manusia dalam urusan politik dan agama, dengan pandangan bahwa hanya Allah yang berhak memutuskan hukum. Konflik ini memaksa Ali bertindak secara militer dalam Perang Nahrawan melawan Khawarij. Meski Ali berhasil memenangkan pertempuran tersebut, ideologi Khawarij tetap bertahan dan terus menjadi ancaman bagi stabilitas politik. Ajaran radikal Khawarij menyebar ke berbagai kelompok, mengilhami pemberontakan lain di kemudian hari (Widodo, 2021).

Pemberontakan ini mencerminkan beratnya tantangan yang dihadapi Ali, yang tidak hanya harus mengatasi konflik militer, tetapi juga harus menghadapi perpecahan ideologis dalam kalangan umat Islam. Pertentangan ini mencerminkan perubahan sosial-politik yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal siapa yang berhak memimpin umat Islam. Masa kekhalifahan Ali menandai peralihan dari kekhalifahan yang didasarkan pada konsensus menuju pemerintahan dinasti, seperti yang diwujudkan oleh Muawiyah dalam pendirian Dinasti Umayyah (Junaidi, 2020).

Dalam sejarah Islam, masa kepemimpinan Ali memiliki dampak yang bertahan lama. Perpecahan politik dan teologis yang muncul selama masa kepemimpinannya memengaruhi perkembangan sekte-sekte dalam Islam, seperti Syi'ah dan Khawarij. Menunjukkan bahwa konflik politik di awal Islam terus memengaruhi dinamika umat hingga saat ini (Hamzah, 2023).

Secara keseluruhan, pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib menggambarkan tantangan besar yang tidak hanya terkait dengan politik, tetapi juga memperdalam perpecahan teologis di kalangan umat Islam dan upaya keras Ali untuk mempertahankan kesatuan umat menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan Islam meskipun menghadapi tantangan yang begitu kompleks dan berat.

Kesimpulan

Ali bin Abi Thalib menghadapi tiga pemberontakan utama selama masa kekhalifahannya, yaitu dari Thalhah cs, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij. Pemberontakan Thalhah cs, yang memuncak dalam Perang Jamal, muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ali. Selanjutnya, konflik besar dengan Mu'awiyah yang berujung pada Perang Shiffin semakin melemahkan posisi Ali. Pemberontakan terakhir datang dari kelompok Khawarij, yang muncul sebagai reaksi terhadap keputusan arbitrase setelah Perang Shiffin. Mereka menuduh Ali telah melanggar prinsip-prinsip Islam, yang kemudian memicu Perang Nahrawan. Meskipun Ali berhasil mengalahkan mereka secara militer, ideologi Khawarij tetap bertahan, dan akhirnya salah satu anggotanya, Abdurrahman bin Muljam, membunuh Ali. Ketiga pemberontakan ini menunjukkan betapa rumitnya tantangan politik dan teologis yang dihadapi Ali, yang pada akhirnya mempercepat berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi berdirinya Dinasti Umayyah.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, R. (2024). Menilik historical peristiwa Tahkim pada masa Ali Bin Abi Thalib. *Maliki Interdisciplinary Journal*.
- Apriyani, A. (2023). Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Tokoh Islam Ali Bin Abi Thalib dan Relevansinya di Era Kontemporer. *Indonesian Journal of Character Education Research*.
- Arfan, A. (2023). *Konsep Ekonomi Pada Masa Khulafaurasyidin*. osf.io.

- <https://osf.io/download/65425bca8a28b11ae2ffc5bd/>
- Azmy, M., & Masyudi, F. (2023). Studi Kritis Terhadap Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Khulaffah Rasyidin Serta Peranannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Journal of International ...* <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/111>
- Buana, M. A. (2024). Peristiwa Peristiwa Penting Pada Masa Khalifah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*. <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jkis/article/view/949>
- Evanorisa, M. S., Bagenda, C., & Dkk. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Febrianti, E., Sabri, S., Asnah, A., & ... (2023). Komparasi Pengelolaan Pendapatan Negara Dari Sektor Zakat Di Masing-Masing Periode Kalifah Ar Rasyidin. *Innovative: Journal Of ...* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1693>
- Hamdi, M. R. (2021). Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Masa Khulafaurasyidin (studi terhadap Pengangkatan Yazid Bin Mu'awiyah Sebagai Khalifah KE-2 Dinasti Umayyah). *E Journal STIS Darussalam Lombok Barat*, 1, 1.
- Hamzah, S. (2023). Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/carita/article/view/3465>
- Hamzah, S., & Hamriana. (2022). Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*.
- Hariyanti, E., & Mawardi, K. (2023). Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pemerintahan Masa Dinasti Umayyah. *Journal on Education*. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/3147>
- Junaidi, J. (2020). Pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*. <http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua/article/view/227>
- Lestari, F., Yunani, Y., Safirah, S., & ... (2024). Peradapan Islam Masa Ali Bin Abi Tahlil. ... *Penelitian Dan ...* <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mutiara/article/view/952>
- M, A. (2020). *Pemikiran Kalam Imam Al-Syafi'i*. Rajawali Pers.
- Muchlisin, A. R. (2022). Al-Jahiz (D. 868/9) on the Virtues of "Ali ibn Abi Thalib (D. 661) and the Limit of Ijma." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/dinika/article/view/5194>
- Muharrom, M. F. (2024). Peradaban Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*. <https://www.ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/376>
- Munawira, S., Hamriani, S., & Rama, B. (2024). Biografi Ali bin Abi Thalib. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Pamungkas, M. A. (n.d.). Sejarah Perkembangan Aliran Khawarij dan Pemikirannya, Serta Kaitannya dalam Pendidikan Islam. *Academia.edu*. https://www.academia.edu/download/110424190/Muhammad_aditya_Pamungkas_MPI_E_SEMESTER1_UAS.pdf
- Pihar, A., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Pemikiran Teologi Klasik Khawarij dan Syi'ah. *MUDABBIR ...* <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir/article/view/84>
- Pratama, T. S., & Prayoga, D. (2023). Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari tahun 655-660M. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan ...* <https://e-jazirah.com.itb-ru.ac.id/index.php/jazirah/article/view/82>
- Rahmawati, E., Kuds, S. B., & Rudiana, R. (2024). Menelusuri Kearifan dan Strategi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://edu.pubmedia.id/index.php/pjpi/article/view/222>
- Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Hijaz: Jurnal Ilmu ...* <https://www.jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/HIJ/article/view/811>
- Rizqullah, M. N. (2022). Pembentukan Stabilitas Politik pada Masa Awal Dinasti Umayyah.

- Jurnal Pendidikan Dan Konseling*
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7251>
- Rokim, S. (2020). Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah Dan Riwayah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan* <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/819>
- Roselani, N., Lubis, M. R., Azhari, S., & Ruwina, Y. (2023). Peradaban Islam Masa Khalifah Rasyidin. *Journal on Education*. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/943>
- Saniah, M., & Sidik, M. A. (2020). Pemikiran Khawarij (Studi Historis Genealogis Pemikiran Islam). *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*.
<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/128>
- Sawaluddin, Harahap, K. S., Rido, I., & Supriono, I. A. (2022). The Islamization of Science and Its Consequences: An Examination of Ismail Raji Al-Faruqi's Ideas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 10, 2.
- Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib). *Yasin*. <https://ejournal.yasin-alsys.org/yasin/article/view/132>
- Sunandar, S., & Tomi, T. (2024). KHULAFĀ RĀSYIDŪN: Sistem Pemerintahan di Masa 'Utmān bin Affān dan 'Ali bin Abi Thālib. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan* <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/97>
- Syarifah, N. (2021). Kepentingan Politik Pemerintahan Mu'awiyah Bin Abu Sufyan: Perpindahan Kekuasaan Dari Kufah Ke Damaskus. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN*
<https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2556>
- Syukur, C. R. M. (2020). Sejarah mata uang masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*.
https://www.academia.edu/download/90600965/pdf_3.pdf
- Tabri, M., & Masyudi, F. (2023). Perkembangan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Journal of International* <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/93>
- Tarigan, M., Khairuzzakiah, H., & ... (2024). Perkembangan Pendidikan Islam di Era Khulafa Ar-Rasyidin. *Jurnal Dirosah* <http://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/jdi/article/view/2417>
- Widodo, S. (2021). Kepemimpinan Rasulullah SAW, Para Sahabat, dan Tabi'in-Tabi'un. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/1208>